KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0080367.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN INDONESIA STOP CORRUPTION

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUSTARI SAWILIN, SH , sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh MUSTARI SAWILIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan INDONESIA STOP CORRUPTION tanggal 07 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016120733100522 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan INDONESIA STOP CORRUPTION;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN INDONESIA STOP CORRUPTION
Berkedudukan di KOTA SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh MUSTARI SAWILIN, SH , yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0080367.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN INDONESIA STOP CORRUPTION

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUYOKO	3374091305770003	PENGURUS	KETUA UMUM
ARI NUGROHO	3374082312740001	PENGURUS	KETUA I
WAWAN SETIONO	3374132110750003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUH BAMBANG SUSILO	3310152504720002	PENGURUS	BENDAHARA
DWI SOFIYANTO	3374151303750001	PENGURUS	HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
ARIES MUNANDAR	3374042506720002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.

Notaris di Semarang:

MUSTARI SAWILIN, SH

Dipindai dengan CamScanner